

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENURUNAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT

THE ROLE OF COMMUNITY PARTICIPATION IN REDUCING POVERTY IN GARUT REGENCY

Ayuka Pradina Ashara Primadipta Sewaminggi, Ahmad Muhajirin, Garan Paruta, Keni Dwikania, Mira Janu
Yustisi, Ribut Qori'ah, Urip Basuki, dan Bayu Kharisma
Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
apapssewaminggi@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to identify the conditions of poverty, the role of community participation in poverty alleviation efforts, and formulate alternative strategies for handling poverty from a social aspect. This research was conducted in Garut Regency, West Java. The collection of research data was carried out using a literature study and interviews using a questionnaire. The data obtained were processed using gap correlation analysis and SWOT analysis. The study shows that poverty in the Garut Regency in 2015-2020 has decreased in the last six years. However, the achievements still need to be improved compared to other regions. There is a strong relationship between community participation, poverty, and human development, with a correlation above 0.9 for each variable. This strong relationship needs to be addressed by optimizing the interrelationships between variables with a comprehensive strategy. An aggressive strategy (S-O) was produced as the best strategy by utilizing natural resources in Garut Regency through collaboration between the Central and Regional Governments while still involving community participation as the development subject in Garut Regency. Collaborative efforts between the government and the community in developing human resources, especially in the educational and economic aspects, are closely related to poverty. Thus, through active community involvement to encourage the participation of all parties to develop the regional economy with the potential it has, it can be an alternative effort to reduce poverty.

Keywords: Poverty, human development, HDI, community participation, SWOT

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi kemiskinan, peran partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan dan merumuskan strategi alternatif penanganan kemiskinan dari aspek sosial. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut Jawa Barat. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan analisis, analisis korelasi serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Garut pada periode 2015-2020 mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, namun capaiannya masih belum optimal dibandingkan dengan daerah lain. Terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi masyarakat, kemiskinan, dan pembangunan manusia dengan korelasi diatas 0,9 pada masing-masing variabel. Hubungan yang kuat tersebut perlu disikapi dengan mengoptimalkan keterkaitan antar variabel dengan strategi yang komprehensif. Strategi agresif (S-O) sebagai strategi terbaik dengan pemanfaatan SDA di Kabupaten Garut melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Garut. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, tersebut khususnya pada aspek pendidikan dan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Dengan demikian, melalui keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendorong partisipasi seluruh pihak membangun ekonomi daerah dengan potensi yang dimiliki dapat menjadi alternatif upaya pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, pembangunan manusia, IPM, partisipasi masyarakat, SWOT

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial dalam suatu masyarakat yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Masalah kemiskinan ini sangat berhubungan dengan kesejahteraan. Pengukuran tingkat kemiskinan

dapat dilihat dari ketidakmampuan masyarakat baik dari segi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan (Alviannor & Fahrati, 2021).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan pokok atau sulitnya akses pendidikan yang layak, pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjangkau dan juga kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Garut merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang masih menghadapi tingkat kemiskinan sebagai permasalahan utama.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut dibentuk demi mengurangi jumlah tingkat kemiskinan. Namun, penanggulangan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Menurut dari hasil pendataan

BPS tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami peningkatan sekitar 18,58 ribu jiwa dari 262.78 ribu jiwa (9.98 %) pada tahun 2020 menjadi sebanyak 281.36 ribu jiwa (10.65 %) pada tahun 2021, atau meningkat sebesar 1%. Sementara itu, pada Gambar 1 menunjukkan bahwa indikator kemiskinan di Kabupaten Garut dalam kurun waktu 2015-2020 mengalami trend perbaikan, namun belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini salah satunya terlihat dari angka kemiskinan di Kabupaten Garut masih cukup tinggi dan perbandingan angka persentase penduduk miskin antara Kabupaten Garut dengan Jawa Barat maupun Nasional.



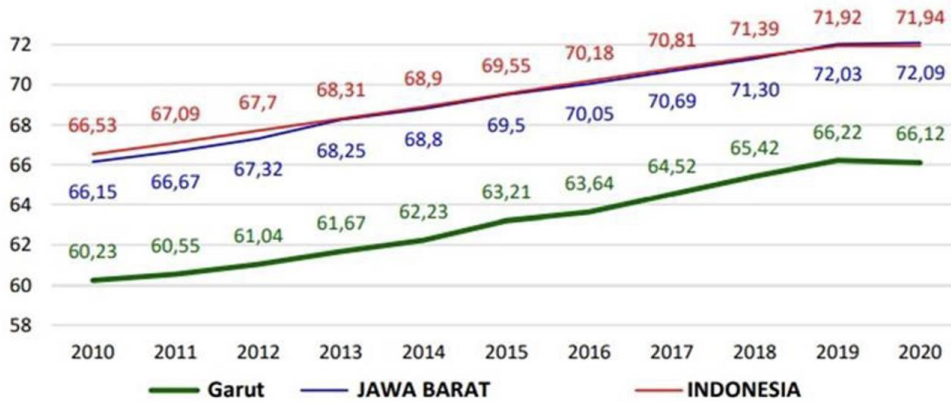
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2009-2020

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019-2024

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memberikan suatu kesejahteraan pada suatu kelompok masyarakat (Endah, 2020). Berdasarkan pandangan antroposentris, manusia dalam pembangunan merupakan obyek dan subyek pembangunan (Wagner & Suteki, 2019). Dengan demikian, manusia berperan sentral dalam suatu pembangunan. Hal ini kemudian memunculkan istilah pembangunan manusia.

Sementara itu, pembangunan manusia dapat diketahui kondisi ketercapaiannya dengan mengukur suatu indikator tertentu, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

atau *Human Development Index* (HDI) (Kirana, Nasution, & Wanto, 2019). IPM merupakan indeks komposit yang mengukur kondisi kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah berkorelasi dengan tingkat ketercapaian IPM, begitu juga di Kabupaten Garut. Dalam perkembangannya, selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 IPM di Kabupaten Garut mengalami trend meningkat. Walaupun jika diranking, IPM Kabupaten Garut tetap berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2010 – 2020

Sumber: Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019-2024

Berbagai kebijakan telah disusun untuk mengurangi masalah kemiskinan, salah satunya untuk menurunkan angka kemiskinan mulai dari yang rumit sampai yang sangat sederhana seperti Bantuan Bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan-bantuan langsung atau semi langsung lainnya. Namun demikian, belum semua kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa program ternyata kurang sesuai dengan kondisi wilayah setempat, bahkan disinyalir bantuan untuk masyarakat miskin sering tidak tepat sasaran. Kebijakan pengentasan kemiskinan kebanyakan belum dapat mengakomodasi potensi wilayah serta karakteristik penduduk miskin sebagai sasaran utama. Hal ini disebabkan kemiskinan tidak bisa hanya didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material atau perspektif ekonomi semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia atau perspektif sosial (Legawati & Nugraheni, 2019).

Penanggulangan atau penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan cara memanfaatkan keunggulan lokal dapat menjadi salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya tanggung jawab masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada di daerah masing-masing dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dalam penanganannya melalui pendekatan aspek sosial utamanya dengan melibatkan masyarakat dapat menjadi kunci mengoptimalkan penangan kemiskinan.

Aspek sosial yang digunakan dalam penanganan kemiskinan adalah melalui partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat

sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar masyarakat, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya (Herman, 2019). Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama melalui strategi penyadaran. Selain itu, keberhasilan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan masyarakat tidak lepas dari partisipasi dan inisiatif dari masyarakatnya mulai dari tahap awal sampai akhir (Macdonald, 2018).

Secara tersirat partisipasi masyarakat menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Garut sebagaimana tercantum pada pembahasan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lebih lanjut, partisipasi masyarakat diadopsi menjadi strategi kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan pada pembangunan daerah Kabupaten Garut selama periode 2019 – 2024. Beberapa contoh partisipasi masyarakat di Kabupaten Garut adalah dalam kegiatan Keluarga Bencana, pemberdayaan perempuan

dan anak, penyelenggaraan kesejateraan sosial, dan pengelolaan sampah. Namun, pada berdasarkan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, partisipasi masyarakat di kegiatan-kegiatan tersebut masih belum optimal dan menjadi bagian dari permasalahan dan isu strategis daerah.

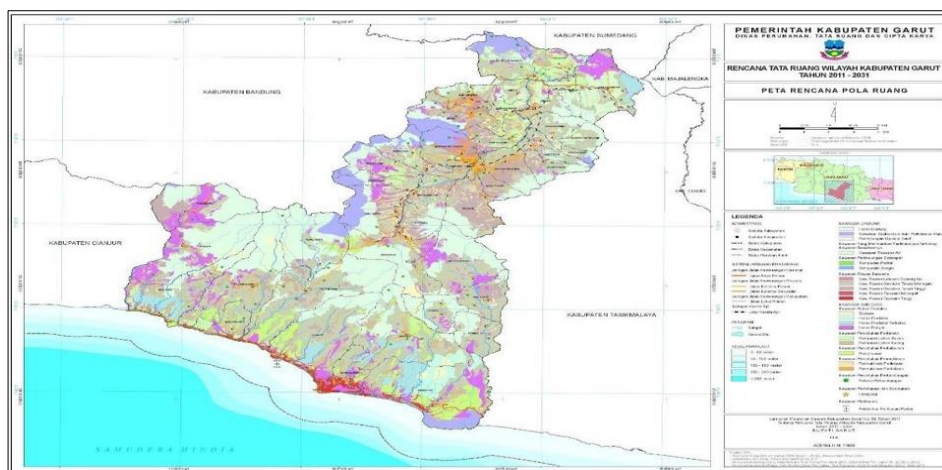
Beberapa hasil studi mengenai pentingnya peran masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan oleh Diyanayati & Padmiati (2017) menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Sulawesi selatan lebih dititikberatkan pada penyadaran masyarakat tentang berbagai kebiasaan yang sudah menjadi budaya dan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Saptatiningsih, Nugrahani, & Rejeki (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Koestedjo (2018) menyatakan bahwa salah satu strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik yaitu mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah mengenai penggunaan metodologi penelitian yang

berbeda dan juga lokasi penelitian, sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan, peran partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan dan merumuskan strategi alternatif penanganan kemiskinan dari aspek sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, mengingat penelitian mengenai peran partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan masih terbatas, khususnya di Kabupaten Garut yang merupakan wilayah yang memiliki kemiskinan ekstem tertinggi ke lima antar kabupaten/kota di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung yang mencapai 82,17 ribu jiwa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2008. Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat $6^{\circ}56'49''$ - $7^{\circ}45'00''$ LS dan $107^{\circ}25'8''$ - $108^{\circ}7'30''$ BT. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 307,407 Ha (3.074,07 km²), dengan batas sebelah Utara adalah Kabupaten Bandung dan Sumedang. Batas sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia, batas sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya, dan batas sebelah Barat dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Kabupaten Garut

Sumber : RPJMD Kabupaten Garut tahun 2014-2019

Secara administratif, Kabupaten Garut mempunyai luas 307.407 ha atau ± 8,28 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi dalam 42 kecamatan dan 422 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibalong dengan luas 21,359 ha atau 6,97% dari luas Kabupaten Garut Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Kersamanah dengan luas 1,650 ha atau 0,54% dari luas Kabupaten Garut.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan (Danandjaja, 2014). Metode kepustakaan ini dipilih karena lebih banyak menggunakan data sekunder yang tersedia.. Pengumpulan data penelitian juga dilakukan dengan wawancara secara daring

menggunakan angket (kuesioner).

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan pribadinya, atau hal lain yang diketahui oleh responden. Sementara itu, dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Syatriani, 2020) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sampel yang dikehendaki

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan 10%

Dalam hal ini bahwa 10% margin eror sama dengan dengan 0,10. Dengan jumlah populasi 43 orang dengan margin error 10% adalah 30.06 atau berjumlah sekitar 30 orang. Data yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Data Sekunder yang Digunakan dalam Penelitian

No	Data	Sumber Data	Tahun
1	Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
2	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
3	Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
4	Pengeluaran per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat	BPS Jawa Barat	2015-2020
5	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut	DP2KBP3A	2019-2024
6	Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut	Bappeda Kabupaten Garut	2014-2018 2019-2024
7	Indikator Kemiskinan	BPS Kabupaten Garut	2015-2020
8	Data jumlah penduduk laki - laki dan perempuan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Garut	Dinas Kependudukan	2020

Data yang dikumpulkan berasal dari instansi terkait seperti Bappeda Kabupaten Garut, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan 3 (tiga) metode yaitu analisis SWOT, analisis kesenjangan dan analisis korelasi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi. Menurut Galavan (2014), analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*) yaitu analisis untuk mendapat strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan

publik saat itu, peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) digunakan untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal kemudian kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Untuk menganalisis masalah kemiskinan dan keterkaitannya dengan indikator pembangunan manusia antara periode maka dilakukan *gap analysis*.

Gap analysis atau analisis kesenjangan merupakan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diinginkan. Berdasarkan teori *discrepancy* atau teori kesenjangan, Jennings, (2000) menyatakan

bahwa ketidakpuasan merupakan perbedaan antara seberapa banyak sesuatu yang seharusnya diterima dan seberapa banyak yang diterima pada kenyataannya. *Gap analysis* dapat digunakan sebagai metode atau alat untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi. Dalam kondisi umum, kinerja suatu institusi dapat tercermin dalam sistem operasional maupun strategi yang digunakan oleh suatu institusi. *Gap* dapat bernilai (+) apabila nilai aktual lebih besar dari nilai target, sebaliknya dapat bernilai (-) negatif.

Korelasi

Korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau lebih yang digambarkan oleh besarnya korelasi. Analisis korelasi merupakan bagian dari ilmu statistika yang mempunyai sembilan macam jenis diantaranya: Korelasi Pearson *Product Moment (r)*; Korelasi Ration (*y*); *Korelasi Spearman Rank atau Rhi (rs atau p)*; Korelasi Berserial (*rb*); Korelasi Poin Berserial (*rpb*); Korelasi Phi (ϕ); Korelasi Tetrachoric (*rt*); Korelasi Kontingency (*C*); Korelasi Kendall's Tau (Sugiyono, 2015). Menurut Cleff (2019) analisis korelasi adalah sekumpulan teknik untuk mengukur hubungan antara dua variabel, gagasan dasar dari analisis korelasi untuk melaporkan hubungan antara dua variabel. Berikut, pedoman untuk memberikan interpretasi dan analisis bagi koefisien korelasi (Sugiyono, 2015). Dalam hal ini, dimana penelitian menggunakan uji korelasi parsial.

Tabel 2. Interpretasi dan Analisis Koefisien Korelasi

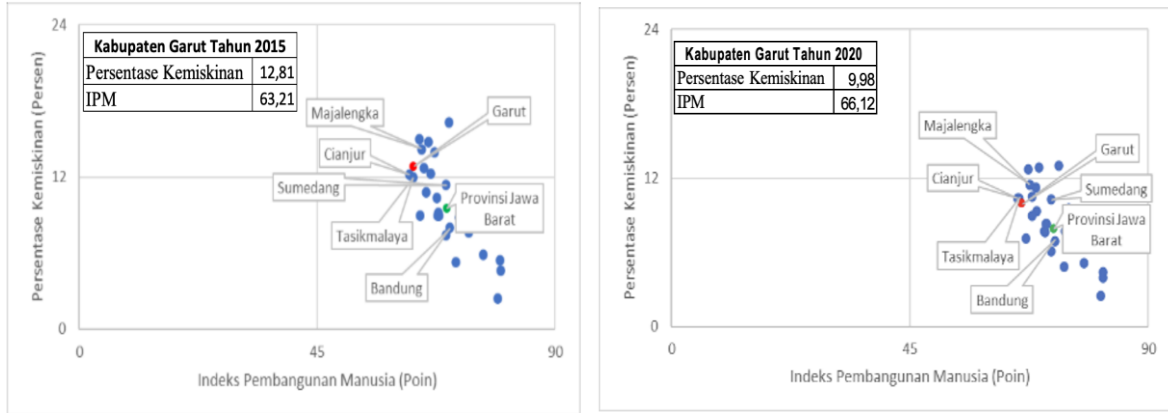
Nilai Korelasi	Kekuatan Hubungan
0,00 – 0,1999	Sangat Rendah
0,20 – 0,3999	Rendah
0,40 – 0,5999	Sedang
0,60 – 0,7999	Kuat
0,80 – 1,0000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono, 2015

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembandingan indikator kemiskinan dan pembangunan manusia antar tahun dapat menggambarkan berkembang dari tiap indikator. Penurunan kemiskinan yang selaras dengan peningkatan indikator pembangunan manusia selanjutnya akan dikaitkan dengan upaya-upaya terkait dari partisipasi masyarakat yang telah dilakukan di Kabupaten Garut.

Selama kurun waktu tahun 2020 secara umum terdapat peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selaras dengan penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Garut sebagaimana tertera pada Gambar 5. Diketahui bahwa IPM pada tahun 2015 sebesar 63,21 poin dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi 66,12 poin. Begitu pula persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan dari 12,81 persen pada 2015 menjadi 9,98 persen di tahun 2020. Apabila disandingkan antara kedua indikator tersebut diketahui bahwa secara rata-rata terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan namun berbeda dengan IPM yang cenderung berada di posisi yang hampir sama antara tahun 2015 dan 2020. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Garut tetapi juga Kabupaten Majalengka dan Cianjur sebagai daerah perbatasan. Berdasarkan capaian tersebut diketahui bahwa dalam kurun waktu enam tahun kualitas IPM di Kabupaten Garut masih tergolong dalam kelompok sedang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi hal tersebut dengan pendekatan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendorong partisipasi seluruh pihak membangun ekonomi daerah dengan potensi yang dimiliki diketahui berdampak positif pada penurunan kemiskinan sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 namun pada indikator pembangunan manusia dengan IPM sebagai pendekatannya diketahui belum mencapai target yang diharapkan hingga saat ini. Berada pada posisi ke 25 dari 27 Kabupaten Kota di Garut mengindikasikan perlu adanya pendekatan yang lebih holistik-integratif dalam penanganan kemiskinan. Selain itu, tidak hanya pendekatan dari kuantitas belanja daerah tetapi juga kualitas dari belanja pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat yang diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan.



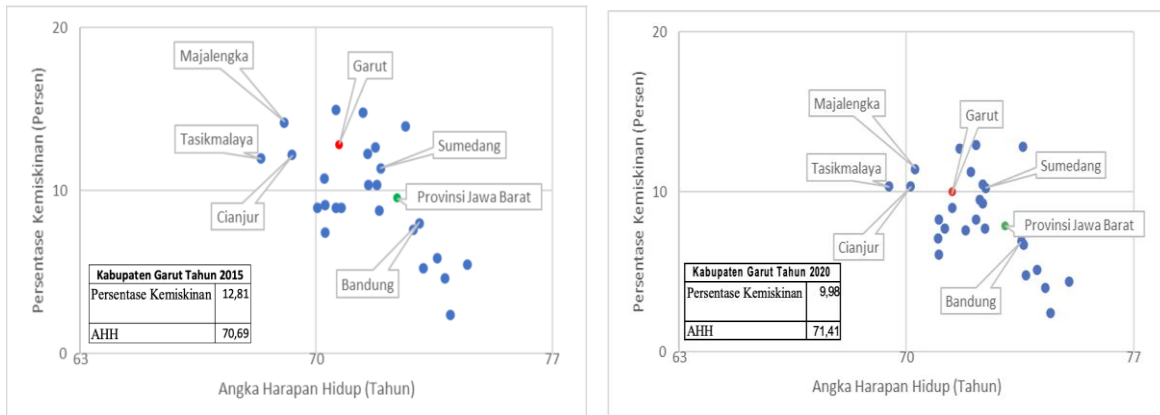
Gambar 5. Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015 dan 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Keterkaitan Aspek Kesehatan dan Kemiskinan di Kabupaten Garut

Faktor kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengentasan lingkaran kemiskinan. Melalui tenaga kerja yang sehat maka diharapkan produktivitas akan meningkat

dan mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan. Aspek kesehatan sebagai salah satu dimensi dalam perhitungan indeks pembangunan manusia secara umum menunjukkan adanya peningkatan angka harapan hidup (AHH) dari tahun 2015 hingga 2020.



Gambar 6. Angka Harapan Hidup dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian dimana pada tahun 2015 AHH Kabupaten Garut sebesar 70,69 tahun dan pada tahun 2020 sebesar 71,41 tahun. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terjadi peningkatan 0,72 tahun atau sekitar 8 bulan 19 hari angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Garut. Capaian tersebut relatif lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 0,63 tahun. Bila dibandingkan dengan daerah lain maka peningkatan AHH Kabupaten Garut dalam kurun waktu yang sama masih lebih rendah dari Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur dan Majalengka.

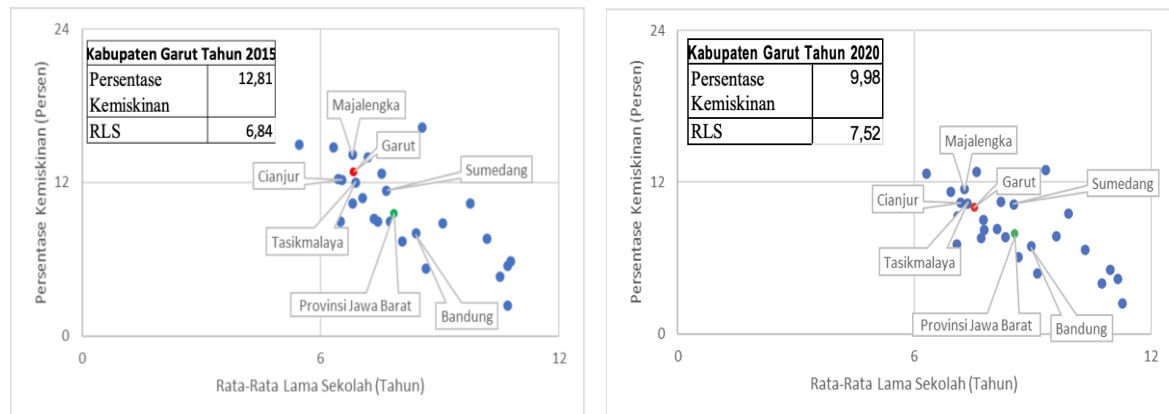
Keterkaitan Aspek Pendidikan dan Kemiskinan di Kabupaten Garut

Faktor pendidikan dalam pembangunan manusia adalah salah satu bentuk investasi yang dilakukan untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang ada melalui peningkatan produktivitas masyarakat.

Melalui pendekatan indeks pembangunan manusia maka dimensi pendidikan dapat dilihat dari dua indikator yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan juga harapan lama sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah yang menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh rata-rata penduduk dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan harapan lama sekolah merupakan

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (umumnya 7 tahun) di masa mendatang secara rata-rata di suatu daerah.



Gambar 7. Rata-Rata Lama Sekolah dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015 dan 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Berdasarkan *gap analysis* yang dilakukan di Kabupaten Garut pada Gambar 7. Tercatat pada tahun 2015 RLS berada pada posisi 6,84 tahun atau dapat dikatakan rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Garut hanya sampai SD kelas 6. Seiring perkembangan waktu pada tahun 2020 diketahui bahwa RLS mencapai 7,52 tahun atau rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Garut hingga kelas 1 SMP. Seiring dengan hal tersebut, terjadi penurunan kemiskinan yang menggeser posisi dari tahun 2015 sebanyak 12,81 persen menuju 9,98 persen pada tahun 2020. Berdasarkan rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat posisi kemiskinan dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Garut antara tahun 2015 dan 2020 mengalami perubahan posisi rata-rata namun tidak signifikan. Apabila dibandingkan dengan daerah lain diketahui bahwa Kabupaten Sumedang berada satu tingkat lebih baik dalam peningkatan rata-rata lama sekolah. Pada periode yang sama terjadi peningkatan 0,85 tahun atau 10,2 bulan sedangkan Garut pada tahun 2015 hingga 2020 meningkatkan RLS sebanyak 0,68 tahun atau 8,16 bulan. Posisi tersebut masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yakni 0,69 tahun.

Keterkaitan Aspek Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Garut

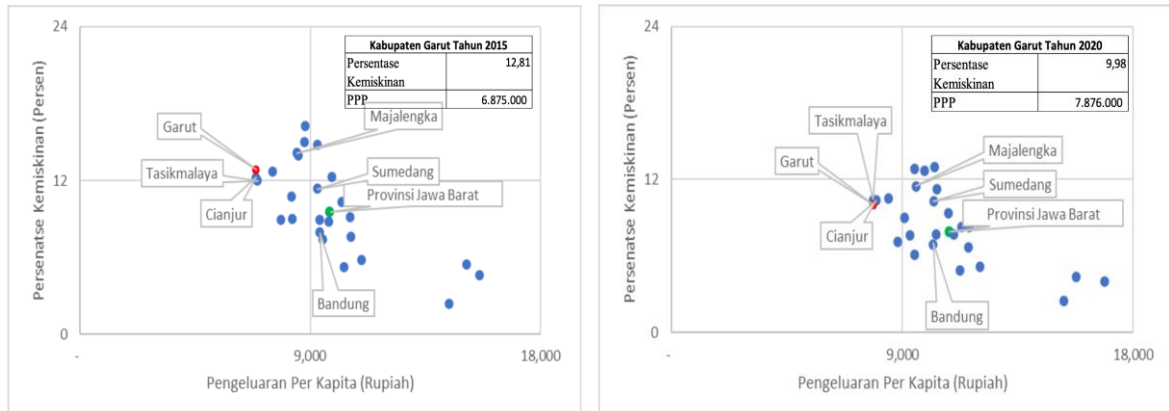
Aspek ekonomi merupakan salah satu bagian utama dalam penyusunan indeks pembangunan manusia. Dimensi pengeluaran yang menjadi

pendekatan ekonomi dapat menggambarkan standar hidup layak (Maulidya, 2021). Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita (PPP) yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*). Melalui peningkatan pengeluaran per kapita yang juga merepresentasikan pendapatan Mengacu pada *gap analysis* yang dilakukan, Kabupaten Garut pada tahun 2015 tercatat bahwa pengeluaran per kapita sebesar Rp. 6.875.000,- dan meningkat selama enam tahun mencapai Rp.7.876.000,-. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

Peningkatan pengeluaran per kapita Kabupaten Garut dalam kurun waktu 6 tahun cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Bandung, dan Sumedang. Namun apabila dibandingkan dengan *starting point* PPP di tahun 2015 dari kabupaten yang berbatasan maka diketahui bahwa Kabupaten Garut menempati posisi terendah dan berada dibawah rata-rata provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut, apabila dilihat pada Gambar 8 dalam kurun waktu 2015-2020 secara umum di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang cenderung terpisah dari rata-rata kabupaten/kota lain. Hal tersebut menggambarkan lambatnya peningkatan PPP dibandingkan dengan rata rata di Provinsi Jawa

Barat. Secara umum permasalahan ini menjadi kendala utama dalam peningkatan IPM yang

tentunya menghambat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut.



Gambar 8. Pengeluaran Per Kapita dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Garut dan Daerah Perbatasan Tahun 2015 dan 2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021 (diolah)

Hubungan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kemiskinan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Mengacu pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa masih belum optimalnya capaian IPM di Kabupaten Garut yang selaras dengan penurunan penduduk miskin yang masih dapat dimaksimalkan. Pendekatan partisipasi masyarakat yang berorientasi pada peningkatan IPM dari dimensi kesehatan, pendidikan dan daya beli dapat diharapkan mampu mendorong pengentasan kemiskinan secara optimal. Guna melihat hubungan antara partisipasi masyarakat, pembangunan manusia dan kemiskinan di Kabupaten Garut maka dilakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel.

Menggunakan data tahun 2015-2020 terkait persentase kemiskinan, IPM dan partisipasi masyarakat yang ditinjau dari keterlibatan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pasca program pada kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dapat diketahui pada Tabel 3 bahwa terdapat hubungan tinggi antara seluruh variabel yang diuji. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terdapat korelasi negatif yang kuat antara kemiskinan dan IPM dengan nilai $-0,9338$. Hal tersebut selaras dengan Singh, (2012) dan Prasada, Yulhar, & Rosa, (2020), dimana IPM

berhubungan dengan penurunan kemiskinan. Lebih lanjut dalam penelitian tersebut, IPM memiliki pengaruh pada upaya pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

Selanjutnya apabila ditinjau hubungan kemiskinan dan partisipasi masyarakat secara umum berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan negatif yang kuat dengan masing-masing nilai sebesar $-0,9048$ untuk partisipasi masyarakat secara swadaya dan $-0,9552$ untuk partisipasi masyarakat dalam konteks pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Garut. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Osei-Kufuor & Koomson, (2014) dan Nugrahani, Suharni, & Saptatiningsih, (2019), dimana partisipasi masyarakat berpengaruh pada penurunan kemiskinan di suatu daerah. Terdapat pula hubungan positif yang kuat antara partisipasi masyarakat dan capaian IPM di Kabupaten Garut. Berdasarkan tabel tersebut diketahui korelasi antar kedua variabel tersebut sebesar $0,9681$ untuk hubungan IPM dan swadaya masyarakat dan $0,9579$ untuk hubungan IPM dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Diperlukan upaya dari *stakeholder* terkait untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Garut, khususnya masalah kemiskinan.

Tabel 3. Analisis Korelasi Indikator Kemiskinan, IPM dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Garut

Keterangan	Persentase Kemiskinan	IPM	Partisipasi: Swadaya Masyarakat*	Partisipasi: Pemeliharaan Pasca Program*
Persentase Kemiskinan	1,0000	-0,9338	-0,9048	-0,9552
IPM	-0,9338	1,0000	0,9681	0,9579
Partisipasi: Swadaya Masyarakat	-0,9048	0,9681	1,0000	0,9249
Partisipasi: Pemeliharaan Pasca Program	-0,9552	0,9579	0,9249	1,0000

Sumber: BPS 2021, RKPD Kabupaten Garut 2021 (diolah)

- Perhitungan dengan menggunakan data primer

Strategi Penanganan Kemiskinan dari Aspek Sosial di Kabupaten Garut

Pada kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut salah satunya menggunakan analisis *Strenghts, Weaknesses, Opportunities*

dan *Threats* (SWOT) untuk menggali potensi sekaligus mengidentifikasi permasalahan berikut solusi kebijakan yang dapat diambil dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut. Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis *Strenghts, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (SWOT)

Faktor Internal Kekuatan (<i>Strenghts</i>)		Faktor Internal Kelemahan (<i>Weakness</i>)	
1. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi program pembangunan daerah di Kabupaten Garut	2. Sumber daya alam melimpah di Kabupaten Garut	3. Komitmen pimpinan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Garut	4. Faktor kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut yang baik (terlihat dari angka harapan hidup)
5. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang responsif dalam penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan manusia di Kabupaten Garut		1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal untuk memenuhi kriteria lapangan kerja	2. Sektor pendidikan formal yang belum optimal di Kabupaten Garut
		3. Tingginya ego sektoral stakeholder dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut	4. Proses perencanaan dan evaluasi yang belum melibatkan masyarakat secara optimal di Kabupaten Garut
		5. Aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Garut	
Faktor Eksternal Peluang (<i>Opportunities</i>)		Faktor Eksternal Ancaman (<i>Threats</i>)	
1. Kolaborasi pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) di Kabupaten Garut	2. Pembangunan manusia secara partisipatif melalui CSR di Kabupaten Garut	3. Budaya gotong-royong antar masyarakat yang mendukung pembangunan di Kabupaten Garut	4. Modal sosial yang tinggi dari masyarakat untuk membantu mayarakat yang lain
5. Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut		1. Arus urbanisasi (desa ke kota) di Kabupaten Garut	2. Masalah sosial-ekonomi dari jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Garut
		3. Potensi bencana alam yang tidak dapat di prediksi di Kabupaten Garut	4. Masuknya pengaruh negatif dari budaya barat ke Kabupaten Garut
		5. Generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi	

Sumber : Hasil Analisis

Tahap selanjutnya adalah melakukan perangkian untuk setiap faktor internal dan eksternal pada masing-masing kategori S-W-O-T. Dengan perangkian maka didapat hasil

tertinggi pada masing-masing kategori (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*) seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perangkingan Faktor Internal dan Faktor Eksternal

No	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Skor	Rangking
1	Sumber daya alam melimpah di Kabupaten Garut	79	1
2	Komitmen pimpinan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Garut	53	2
3	Pelibatan masyarakat dalam implementasi program kegiatan pembangunan daerah di Garut	30	3
4	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang responsif dalam penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan manusia di Kabupaten Garut	24	4
5	Faktor kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut yang baik (terlihat dari angka harapan hidup)	19	5
No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Skor	Ranking
1	Proses perencanaan dan evaluasi yang belum melibatkan masyarakat secara optimal di Kabupaten Garut	24	1
2	Aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Garut	24	2
3	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal untuk memenuhi kriteria lapangan kerja	23	3
4	Tingginya ego sektoral dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut	18	4
5	Sektor pendidikan formal yang belum optimal di Kabupaten Garut	7	5
No	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Skor	Ranking
1	Keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut	45	1
2	Kolaborasi pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) di Kabupaten Garut	30	2
3	Pembangunan manusia secara partisipatif melalui CSR di Kabupaten Garut	30	2
4	Budaya gotong-royong antar masyarakat yang mendukung pembangunan di Kabupaten Garut	30	2
5	Modal sosial dari masyarakat untuk membantu masyarakat lain yang tinggi	30	2
No	Ancaman (<i>Threats</i>)	Skor	Ranking
1	Masalah sosial-ekonomi dari jumlah penduduk yang tinggi di Kabupaten Garut	38	1
2	Potensi bencana alam yang tidak dapat di prediksi di Kabupaten Garut	27	2
3	Arus urbanisasi (desa ke kota) di Kabupaten Garut	25	3
4	Generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi	23	4
5	Pengaruh negatif dari budaya barat yang masuk ke Kabupaten Garut	18	5

Sumber : Hasil Analisis

Dalam menganalisis strategi peran partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut dapat memanfaatkan strategi *Strengths – Opportunities* (SO) yaitu gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang antara lain melalui:

1. Mengoptimalkan sumber daya alam di Kabupaten Garut dengan keterlibatan pemerintah pusat dan provinsi secara kolaboratif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut
2. Meningkatkan komitmen pimpinan untuk kolaborasi secara pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media) untuk menurunkan kemiskinan
3. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan daerah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR)

secara partisipatif.

4. Meningkatkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong dengan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
5. Meningkatkan faktor kesehatan masyarakat yang baik sebagai modal sosial dari masyarakat untuk membantu masyarakat lain.

Strategi *Weakness-Opportunities* (W-O) yakni gunakan peluang, menanggulangi kelemahan, diperoleh beberapa strategi kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan keterlibatan pemerintah pusat, provinsi dan masyarakat secara optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk menangani kemiskinan.

2. Meningkatkan kolaborasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) dalam aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia secara partisipatif melalui CSR untuk mengoptimalkan kapasitas SDM yang memenuhi kriteria lapangan kerja.
4. Meningkatkan budaya gotong-royong antar masyarakat dalam pembangunan untuk mengurangi ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.
5. Mengoptimalkan sektor pendidikan formal untuk meningkatkan modal sosial dari masyarakat dalam membantu masyarakat lain.

Strategi *Strengths -Threats (S-T)* yakni kekuatan mengubah ancaman menjadi peluang diperoleh beberapa strategi kebijakan antara lain:

1. Mengoptimalkan sumber daya alam yang melimpah untuk mengatasi masalah sosial - ekonomi dari perspektif demografi.
2. Memperkuat komitmen pimpinan untuk memitigasi dan mengatasi potensi bencana alam yang berdampak pada kemiskinan.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah untuk mengurangi arus urbanisasi (desa ke kota).
4. Memperkuat peranan ASN dalam merespon dan menangani generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi.
5. Meningkatkan faktor kesehatan masyarakat yang baik untuk mengurangi pengaruh negatif dari budaya barat yang masuk.

Pada asumsi *Weakness-Threats (W-T)* yakni perkecil kelemahan, hindari ancaman diperoleh beberapa strategi kebijakan antara lain :

1. Mengoptimalkan proses perencanaan dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi secara demografi.
2. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat yang belum optimal untuk memitigasi potensi bencana alam yang tidak dapat di prediksi.
3. Meningkatkan SDM yang belum optimal untuk menghindari arus urbanisasi (desa ke kota).
4. Meningkatkan pemahaman generasi muda yang belum memahami esensi dan manfaat positif dari globalisasi untuk menekan ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.
5. Memperkuat sektor pendidikan formal yang belum optimal untuk mengurangi pengaruh

negatif dari budaya barat yang masuk.

Berdasarkan hasil analisis strategi berkaitan dengan peran masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Garut maka diprioritaskan pada strategi *Strength - Opportunities (SO)* yaitu dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki untuk mengambil manfaat dari peluang lingkungan yang ada. Pemilihan strategi ini didasarkan pada perankingan dengan skor yang tertinggi. Pemerintah daerah pasti ingin daerahnya dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Garut juga akan berusaha untuk memenuhi strategi yang lain yaitu strategi *Weakness-Opportunities (WO)*, *Strength-Threats (ST)*, atau *Weakness-Threats (WT)* untuk menciptakan kondisi dimana pemerintah daerah dapat menerapkan strategi SO. Ketika sebuah daerah mempunyai kelemahan utama, maka daerah tersebut akan berusaha mengatasinya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Begitu juga ketika daerah menghadapi ancaman yang besar, maka sebuah daerah tersebut akan menghindarinya dan berkonsentrasi kepada peluang. Dapat dilihat bahwa analisis SWOT merupakan perkembangan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal, merupakan kekuatan (S) serta kelemahan (W) terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang (O) serta ancaman (T).

Potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan bahwa faktor kekuatan yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi internal baik dari kapasitas individu masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dapat meminimalkan kelemahan berkaitan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan aktivitas perekonomian masyarakat yang terbatas. Oleh karena itu perlu adanya upaya intensif komitmen pemerintah daerah dalam memberikan peluang ekonomi kepada untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sedangkan berdasarkan hasil identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan bahwa faktor eksternal peluang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, akademisi dan masyarakat cukup potensial dalam menangkap peluang berkaitan keterlibatan pemerintah pusat maupun provinsi dalam menghadapi permasalahan sosial- ekonomi pada masyarakat.

Mengacu pada hasil pembahasan maka ditentukan beberapa poin penjabaran atau penjelasan dari strategi S – O (Agresif) sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Garut dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat secara kolaboratif dalam penanganan kemiskinan meliputi adanya program-kegiatan pada pemerintah pusat dan provinsi berupa program-kegiatan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Garut meliputi pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan pariwisata potensi alam (daratan dan laut), pelatihan olahan makanan, pengembangan IKM yang berkaitan dengan industri kulit karena Kabupaten Garut terkenal dengan industri kulit dombanya dengan adanya berbagai program baik dari Pemerintah Daerah Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat akan berdampak pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Garut;
2. Meningkatkan komitmen pimpinan daerah untuk melakukan kolaborasi secara *pentahelix* yang meliputi dari unsur akademisi, dunia usia, komunitas/masyarakat, pemerintah daerah dan media untuk menurunkan kemiskinan. Upaya yang dapat dilakukan dengan misalnya dengan mengoptimalkan gerakan-gerakan yang ada. Salag satu gerakan tersebut antara lain *Genra Karya* ini yang merupakan suatu terobosan dari *Disnakertrans* Kabupaten Garut yang berkolaborasi secara *pentahelix* bersama dengan beberapa elemen untuk menangani angka pengangguran di Kabupaten Garut. Gerakan seperti itu harus dipertahankan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Garut yang dari tahun tahun semakin meningkat. Program *Genra Karya* melibatkan semua unsur masyarakat dan *stakeholder* untuk dapat berbuat, bekerja, atau berkarya sehingga kalau masyarakat berkarya baik secara informal maupun formal bekerja di perusahaan atau manufaktur di industri ataupun berkarya mempunyai wirausaha sendiri yang kemudian masyarakat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lain;
3. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan daerah melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara partisipatif. Pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Garut untuk melibatkan masyarakat untuk dapat secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan melalui CSR misalnya berupa pembangunan fisik sarana prasarana antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat hingga optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagainya sehingga masyarakat juga akan merasakan manfaat dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh perusahaan;
4. Meningkatkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong dengan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Garut. Perlu dipertahankannya sikap gotong royong antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat berupa sumbang tenaga, pikiran, materi dan hal lainnya. Salah satu gerakan yang telah dilakukan adalah *Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)*. Diketahui bahwa Kabupaten Garut selalu mendapatkan nominasi juara dalam pelaksanaan program *Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)* baik ditingkat Provinsi maupun nasional. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan semangat kebersamaan kekeluargaan menuju penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil akhir pembangunan;
5. Meningkatkan faktor kesehatan masyarakat yang baik sebagai modal sosial dari masyarakat untuk membantu masyarakat lain. Penduduk Kabupaten Garut memiliki modal sosial berupa sikap atau *attitude* yang di miliki mayoritas penduduknya yaitu *silih asah, silih asuh, silih asih*. Hal ini dapat menjadi kekuatan antar masyarakat Garut untuk saling tolong menolong dan menjaga satu sama lain. Diharapkan masyarakat Kabupaten Garut dapat selalu menjaga sikap sosial ini ditengah budaya-budaya barat atau modern masuk ke lingkungan sosial di Kabupaten Garut. Rasa solidaritas sosial masyarakat di Kabupaten Garut harus terus

ditingkatkan untuk membantu masyarakat yang lain. Melalui keterlibatan pemerintah untuk menguatkan modal sosial yang ada melalui program-kegiatan terkait maka diharapkan dapat meningkatkan kekuatan intrinsik secara sosial di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka strategi agresif (*strength-opportunity*) menjadi pilihan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan di Kabupaten Garut secara umum mengalami penurunan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir namun capaiannya masih belum optimal apabila dibandingkan dengan daerah lain.

Pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengakselerasi capaian tersebut melalui keterlibatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang resilien. Kemiskinan memiliki hubungan yang kuat dengan partisipasi masyarakat dan pembangunan manusia sehingga perlu disikapi dengan mengoptimalkan keterkaitan antar variabel tersebut dengan strategi yang komprehensif. Pendekatan partisipasi masyarakat dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat untuk menekan masalah kemiskinan. Partisipasi tersebut meliputi upaya bersama untuk membangun komunitas yang terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi di tingkat masyarakat, memberikan edukasi terkait pengembangan perekonomian sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, melakukan mentoring dan pengembangan bisnis secara swadaya, melakukan regenerasi pelaku ekonomi, hingga melakukan penguatan partisipasi antar masyarakat dan pelaku bisnis. Upaya tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dan mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Garut.

Strategi agresif (S-O) merupakan pilihan strategi terbaik dengan pemanfaatan SDA di Kabupaten Garut melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Garut. Guna menekan angka kemiskinan maka diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan manusia khususnya pada aspek pendidikan dan ekonomi yang berkaitan erat dengan kemiskinan.

Partisipasi masyarakat yang optimal dapat memberdayakan masyarakat secara umum di Kabupaten Garut. Pembangunan manusia yang melibatkan partisipasi masyarakat perlu diciptakan agar muncul pembangunan *bottom-up* yang menjawab permasalahan di lingkungan masyarakat. Gerakan-gerakan yang dirancang oleh pemerintah perlu mengoptimalkan peran masyarakat sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Garut perlu melakukan pendataan, perencanaan hingga move dari setiap gerakan partisipasi masyarakat yang memanfaatkan potensi SDA sehingga muncul pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan tujuan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviannor, A., & Fahrati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/jiep.v4i1.3544>
- Bappeda Kabupaten Garut. (2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019*. Kabupaten Garut: Bappeda Kabupaten Garut.
- Bappeda Kabupaten Garut. (2021). *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024*. Kabupaten Garut: Bappeda Kabupaten Garut.
- BPS. (2021). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2021*. Bandung: BPS.
- BPS. (2021). *Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2021*. Garut: BPS.
- Cleff, T. (2019). *Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics. Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-17767-6>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 0(52). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Diyanyati, K., & Padmiati, E. (2017). Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, N.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat*:

- Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Jennings, M. D. (2000). Gap analysis: Concepts, methods, and recent results. *Landscape Ecology*, 15(1). <https://doi.org/10.1023/A:1008184408300>
- Kirana, I. O., Nasution, Z. M., & Wanto, A. (2019). Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Menggunakan Metode Statistical Parabolic Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 16(2). <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v16i2.18178>
- Koestedjo, E. H. (2018). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(1). <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i1.445>
- Legawati, L., & Nugraheni, S. A. (2019). Determinan Sosial, Budaya Dan Kesehatan Serta Faktor Risiko Kehamilan Remaja Di Negara Miskin Dan Berkembang. *Journal Of Research In Public Health Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.33486/jrphs.v1i1.13>
- Macdonald, C. (2018). The Role of Participation in Sustainable Community Development Programmes in the Extractive Industries. *Extractive Industries: The Management of Resources as a Driver of Sustainable Development*, (February).
- Maulidya, R. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2015 – 2018). *Jurnal Ilmiah*, 9.
- Nugraheni, T. S., Suharni, S., & Saptatiningsih, R. I. (2019). Potential of Social Capital and Community Participation in Village Development. *JEJAK*, 12(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.15775>
- Osei-Kufuor, P., & Koomson, F. (2014). Reducing poverty through community participation: The case of the National Poverty Reduction Program in the Dangme-West district of Ghana. *International Journal of Development and Sustainability*, 3(8).
- Prasada, I. Y., Yulhar, T. F. M., & Rosa, T. A. (2020). Determinants of poverty rate in Java Island: Poverty alleviation policy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2). <https://doi.org/10.29259/jep.v18i2.11664>
- Saptatiningsih, R. I., Nugraheni, T. S., & Rejeki, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Singh, R. (2012). Human Development Indeks and Poverty Linkages. *Journal of Marketing and Technology*, 2(5).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 5).
- Syatriani, D. (2020). Rumus Slovin. *Dwi Syatriani*, 5(3).
- Wagner, I., & Suteki, S. (2019). Independensi Penilaian Amdal Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.404-424>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Tabel Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 6. Contoh Tabel KAFI

Kesimpulan Analisis Faktor Internal						
No	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor (BxR)	Ranking	Kesimpulan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
	Kekuatan (Strengths)					
1						Total S
2						
3						
	Kelemahan (Weakness)					
1						Total W
2						
3						
	Total	100				

Range rating : 4 (sangat menonjol), 3 (menonjol), 2 (tidak menonjol), 1 (paling tidak menonjol)

Lampiran 2. Contoh Tabel Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) yang digunakan dalam penelitian ini

Tabel 7. Contoh Tabel KAFE

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal						
No	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor (BxR)	Ranking	Kesimpulan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
	Peluang (Opportunities)					
1						Total O
2						
3						
	Ancaman (Threats)					
1						Total T
2						
3						
	Total	100				

Range rating: 4 (sangat menonjol), 3 (menonjol), 2 (tidak menonjol), 1 (paling tidak menonjol)